REDENOMINASI RUPIAH

Oleh Arwin Rasyid

Rencana pemerintah melakukan redenominasi rupiah tinggal selangkah lagi. Usulan RUU Redenominasi yang digagas Bank Indonesia tampaknya akan berjalan lancar. Presiden pun telah merestui langkah ini (Bisnis Indonesia, 26 Juli 2017). RUU yang jumlahnya sekitar 17 pasal tersebut, tinggal menunggu persetujuan DPR untuk disahkan menjadi UU.

Setelah menjadi UU, beberapa tahun ke depan, era baru mata-uang Indonesia akan dimulai—dimana uang Rp1000 akan dihilangkan "nol"-nya tiga buah menjadi Rp1.- Di beberapa negara seperti Turki, bukan hanya angka nol-nya yang dihilangkan sebanyak enam angka nol, tetapi penyebutan mata-uang Lyra berubah, dari TL—*Turkey Lyra* menjadi YTL—*New Turkey Lyra*.

Meski jumlah nol-nya dihilangkan, nilai mata-uangnya tidak berubah, karena perubahan tersebut diikuti penyesuaian harga-harga barang. Harga *Handphone* yang semula Rp1000.000.- tetap dapat dibeli dengan uang rupiah yang baru senilai Rp1000.- Kebijakan ini tak berpengaruh terhadap pasar modal. Transaksi berlangsung seperti biasa, hanya saja dalam nominal yang lebih ringkas. Sangat baik buat penyajian laporan keuangan karena angka-angkanya lebih sedikit dan *simple*. Hilangnya tiga nol akan lebih menghemat memory data sehingga jumlah "byte"-nya berkurang, dan sebagainya.

Masyarakat, tak perlu khawatir karena redenominasi tidak sama dengan *Sanering*—yang pernah dialami bangsa ini pada 30 Maret 1950 saat pemerintah menggunting nilai uang kertas yang bernilai Rp5,00 ke atas menjadi separuh nilai sebelumnya. Kemudian, pada 24 Agustus 1959 dimana nilai mata uang Rp10.000 dan Rp5.000—diturunkan nilainya menjadi Rp100 dan Rp50.-

Pada tahun 1966 pemerintah pernah melakukan redenominasi namun gagal. Masyarakat menganggapnya sebagai sanering, yakni saat mengganti uang lama Rp1000.- dengan uang Rp1.- yang baru. Inflasi langsung melonjak hingga 650%. Pemerintahan pun berganti.

Di sinilah pentingnya komunikasi, sosialisasi dan stabilitas politik serta dilakukan saat kepercayaan terhadap pemerintah cukup tinggi.

Komunikasi dan Sosialisasi

Sekali dicanangkan, there is no way return kecuali harus berjalan sukses. Edukasi dan sosialisasi menjadi kata kunci keberhasilan redenominasi. Biaya yang dikeluarkan tentu tak sedikit. Misalkan biaya cetak uang kertas rupiah baru rata-rata Rp400.- per-lembar, jika harus mencetak 20 milyar lembar uang kertas saja, biayanya tak kurang dari Rp8 triliun. Belum termasuk mencetak koin, jika biaya cetak uang logam adalah Rp80.- per-koin, maka untuk mencetak 5 milyar koin perlu biaya Rp400 milyar.

Redenominasi hendaknya disosialisasikan sebagai penyederhanaan mata uang menjadi lebih kecil tanpa mengubah nilai tukarnya. Sederhananya, redenominasi rupiah adalah "penghilangan nol" dalam mata uang rupiah yang baru.

Di berbagai negara, redenominasi biasanya dilakukan saat terjadi hiper-inflasi yang membuat mata-uang lokal tidak menarik. Inflasi yang luar biasa menyebabkan harga semakin mahal. Di Turki, sebelum redenominasi pada 2005: harga 1 botol aqua 300.000 TL, tiket bioskop 7.500.000 TL, harga Toyota Corolla 32.900.000.000 TL (32,9 Milyar TL), dan GDP 2002 mencapai 273.463.167.795.000.000 TL (273.5 Quadriliun TL).

Bayangkan, betapa repotnya melakukan transaksi dengan nilai uang seperti itu. Jika transaksi dilakukan tunai, berapa banyaknya jumlah uang yang harus dibawa. Jika harus dihitung, berapa lama menghitungnya? Bagaimana kalau terjadi salah hitung? Bagaimana kalau uang kertasnya banyak yang rusak? Jika harus dicetak di buku tabungan atau sertifikat deposito, berapa panjang spasi yang harus disediakan.

Saat itu terjadi, Turki melakukan redenominasi dengan menghilangkan 6 angka nol. 1 YTL sama dengan 1000.000 TL. Harga tiket bioskop pun menjadi 7.5 YTL, harga mobil Toyota Corolla pun menjadi 32.900 YTL. Lebih praktis, efisien dan mudah untuk transaksi.

Redenominasi—sebagai sebuah kebijakan hendaknya dipandang sebagai langkah positif. Redenominasi memiliki sejarah panjang: pada abad ke-19, ketika pemerintah menghadapi kekurangan emas atau perak, mereka menyesuaikan nilai koin mereka (Helleiner, 2003). Bahkan, di negara-negara transisi dan berkembang, dalam sebuah penelitian, total redenominasi yang dilakukan jumlahnya ada 60 kali dalam rentang 1960-2003.

Redenominasi itu bervariasi. Mulai dari menghapus satu nol hingga enam nol. Redenominasi median menghapus tiga angka nol, membagi mata uang dengan 1000. Banyak negara melakukan redenominasi hanya satu kali saja. Ada pula yang melakukannya dua kali—dalam waktu yang cukup lama, seperti Bolivia, pada 1963 dan 1987, dan ada yang melakukannya dalam selang waktu singkat, seperti Peru pada 1985 dan 1991. Argentina, bekas Yugoslavia/Serbia dan Brasil termasuk negara yang sering melakukan redenominasi.

Tujuan redenominasi pun berbeda-beda. Di India, PM Narendra Modi pernah ditentang warganya, karena melakukan redenominasi dalam waktu hanya 3 hari. Mulai pukul 8 malam, hingga 3 hari setelah pengumuman, warga India harus menukar uang lamanya dengan uang baru. Tujuan Modi jelas, ingin menggali "black money"—yakni uang illegal dan uang legal namun tidak tercatat sistem keuangan formal (underground economy) yang banyak beredar di luar kontrol pemerintah. Modi menganggap redenominasi dapat mengentaskan kemiskinan dan pemerintah dapat lebih mengontrol peredaran uang.

Tingginya Kepercayaan kepada Pemerintah.

Selain berbeda dengan India dalam hal tujuan dan prosesnya, Bank Indonesia menyebutkan redenominasi rupiah akan dilakukan bertahap. Tahap persiapan (2018-2019); Tahap Transisi (2020-2024)—masa dimana Bank Indonesia menerbitkan uang baru; dan Tahap *Phase-Out* (2025-2029)—yakni masa penarikan uang lama. Ini langkah bijak.

Redenominasi rupiah pun akan dilakukan dalam situasi makro-ekonomi yang stabil. Inflasi rendah di angka 3%. Kepercayaan terhadap pemerintah tinggi. Indonesia menduduki ranking pertama—score 80% (2016) dalam hal Trust and Confidence in National Government berdasarkan Gallup—yang dikeluarkan OECD dalam Government at a Glance 2017 pada 13 Juli 2017. Mengalahkan negara-negara OECD (Amerika Serikat 30%, Inggris 31%, Jerman 55%,

Prancis 28%) maupun non-OECD (India 73%, Brazil 26%, Afrika Selatan 48%). Enam peringkat teratas adalah Indonesia, Swiss, India, Luksemburg, Norwegia dan Kanada.

Kepercayaan tersebut akan menjadi modal pemerintah menyukseskan kebijakan redenominasi. Pemerintah perlu menjaga agar implementasinya konsisten dengan tujuan redenominasi rupiah yang ditetapkan, yakni bertujuan efisiensi—berupa penyederhanaan angka mata-uang bukan pemotongan nilai mata-uang atau devaluasi. Pesan ini harus sampai dan dipahami masyarakat luas---dari Sabang hingga Merauke. Sehingga, transaksi menggunakan uang rupiah yang baru dapat dilakukan lebih efisien dan nyaman.

Dengan tujuan redenominasi yang *clear* tersebut, diharapkan redenominasi dapat memberi manfaat bagi masyarakat dan meningkatkan kewibawaan dan kredibilitas rupiah di kawasan regional (ASEAN). Setelah redenominasi, 1 USD nilainya menjadi Rp13,3.- setara RM4,28 dan 50,58 Peso Filipina, setara SGD 1,36 dan 33,33 Baht Thailand, setara 64,14 Rupee India. Bayangkan saat ini 1 USD = Rp13.321,- tidak setara dengan konversi kurs mata uang mereka terhadap USD—yang nominalnya jauh lebih kecil dari konversi ke rupiah.

Satu hal yang perlu dijaga pemerintah adalah memastikan agar redenominasi tidak malah menjadi pendorong inflasi terselubung. Inflasi yang disebabkan ulah para pedagang yang menaikkan harga barang melalui pembulatan angka ke atas (rounding-up).

Harga jual Bakmie di restoran yang semula Rp27.500,- menjadi Rp27,5 dan dibulatkan menjadi Rp30,00.- pembulatan tersebut tanpa disadari merupakan kenaikan harga Bakmie per-porsi. Tidak terasa signifikan, karena pembulatan terjadi di angka nominal yang kecil. Padahal dengan uang lama, terjadi kenaikan harga sebesar Rp2500.- per-porsi.

Harapan kita, kebijakan redenominasi rupiah dapat berjalan sukses, bermanfaat dan menjadi simbol kedaulatan dan kebanggaan rakyat Indonesia, serta dapat mendorong masyarakat lebih mencintai rupiah sebagai mata-uang negaranya sendiri. Semoga!

Arwin Rasyid, praktisi industri keuangan.